

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Afandi, Fachrizal. *Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2022.
- . *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2022.
- . *Tujuan dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2022.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamsir. *Hukum Pidana Khusus*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Loqman, Loebby. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.
- Lubis, Arief Fahmi, dkk. *Hukum Pidana*. Sukabumi: Haura Utama, 2023.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications, 2014.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

- , dan Diah Sulistyani. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (1980–2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.
- . *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni Penerbit Akademik, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- , dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- . *Hukum Pidana 1*. Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsah, T.N. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni, 2011.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.
- Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana*. Padang: Andalas University Press, 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adhari, Ade. "Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi Hukum Pidana." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 2, no. 3 (2023): 48–51.
<https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.161>

Alfange Jr., Dean. "Jeremy Bentham and the Codification of Law." *Cornell Law Review* 55, no. 3 (1969): 62–63.

Bergel, Jean-Louis. "Principal Features and Methods of Codification." *Louisiana Law Review* 48, no. 5 (1988): 1073.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Kompatibilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 253.

Izzati, Meydina. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana di Luar KUHP." *Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): 611–613.

Mirzaqon, dan Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa* 8, no. 1 (2017): 187.

Salwa, Arya, dan Rasji. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika." *Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

Saputri, Amelia. "Korupsi sebagai Patologi Sosial Sistemik di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 346.

Koran/Majalah/Portal Berita

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “RUU KUHP Anut Kodifikasi Terbuka.”

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. https://reformasikuhp.org/ruu-kuhp-anut-kodifikasi-terbuka__trashed/

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “Akademisi Ini Jelaskan Konsekuensi Logis

Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP.” Aliansi Nasional Reformasi KUHP. <https://reformasikuhp.org/akademisi-ini-jelaskan-konsekuensi-logis-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp/>

Antara News. “Guru Besar UI: KUHP Baru Terdapat Lima Misi.” Antara News.

<https://www.antaranews.com/berita/3311842/guru-besar-ui-kuhp-baru-terdapat-lima-misi>

Abas, Ibnu. “Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional

2023.” Dandapala. <https://www.dandapala.com/opini/detail/pertautan-delik-korupsi-dalam-uu-tipikor-dan-kuhp-nasional-2023>

Prasojo, Bintoro Wisnu. “Integrasi Core Crimes dalam KUHP Nasional: Analisis

De Minimis Implikasinya.” Dandapala. <https://www.dandapala.com/opini/detail/integrasi-core-crimes-dalam-kuhp-nasional-analisis-de-minimis-implikasinya>

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1915 Nomor 732).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan *Single Convention on*

Narcotic Drugs, 1961 dan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1972.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016.

Instrumen Hukum Internasional

International Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Geneva, 1937.

Single Convention on Narcotic Drugs. New York, 1961.

Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs. Geneva, 1972.

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna, 1988.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. New York, 1997.

Rome Statute of the International Criminal Court. Rome, 1998.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. New York, 1999.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Palermo, 2000.

United Nations Convention Against Corruption. New York, 2003.

Standar Internasional

Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation (FATF Recommendations).